



# Ada 20 Anak Dalam Satu Alamat

## ■ ORI DIY Telusuri Kasus Famili Lain Saat PPDB Jalur Zonasi

**YOGYA, TRIBUN** - Fenomena menumpang Kartu Keluarga (KK) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi wilayah SMP dan SMA di Kota Yogya kembali menyeruak. Ombudsman RI (ORI) Perwakilan DIY pun turun tangan untuk menelusuri aduan masyarakat terkait fenomena ini.

Salah satu aduan yang masuk, ORI mendapati modus satu alamat yang ditempati dua KK, di mana masing-masing KK terdapat 10 anak dengan status famili lain. Alhasil, dalam rumah yang berlokasi dekat dengan salah satu sekolah favorit di Kota Yogyakarta tersebut, secara keseluruhan terdapat 20 anak berstatus famili lain.

Menindaklanjuti aduan tersebut, jajaran ORI lantas mendatangi kantor Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kota Yogya, Rabu (12/7). Dalam kesempatan tersebut, ORI melakukan upaya penelusuran informasi mengenai proses, hingga alur perpindahan penduduk di wilayah Kota Yogyakarta.

"Ini baru tahap awal, data-data yang kita dapat ini sangat penting untuk pendalaman," ucap Perwakilan Tim Lapangan ORI DIY, Rifki Taufiqurrahman, selepas pertemuan di Kantor Disdukcapil, Balai Kota Yogya, Rabu (12/7).

Ia tidak memungkiri dalam hal regulasi perpindahan penduduk, fenomena menumpang KK merupakan satu hal yang wajar dan terkesan biasa-biasa saja. Namun, ketika fenomena itu dikaitkan dengan PPDB, maka bisa jadi akan menimbulkan polemik, karena banyak pihak yang merasa dirugikan praktik-praktik tersebut.

"Data adminduk sudah kami dapatkan, berikut alasan pindah dan masuk KK mana, sudah kami dapat. Tapi, itu masih data awal, belum dikaitkan dengan regulasi PPDB, prosesnya masih panjang," tambah Rifki.

Menurutnya, aduan terkait fenomena menumpang KK tersebut tidak sebatas ditemukan di Kota Yogya saja, karena di Kabupaten Gunungkidul juga terjadi. Karena itu, pihaknya bakal terus

melanjutkan penelusuran di lapangan, untuk menyajikan masukan-masukan guna perbaikan proses PPDB zonasi wilayah ke depan.

"Kami tindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat. Akan kami telusuri, apakah ada masalah, atau tidak ada masalah dalam proses PPDB ini," tandas Rifki.

Kepala ORI DIY, Budhi Masturi, sebelumnya berujar, kecurangan yang ditemukannya antara lain soal calon siswa numpang KK, memanipulasi data kemiskinan, hingga perjkian wali. Oleh sebab itu, ia mendorong pemangku kepentingan untuk melakukan perbaikan, agar pelaksanaan PPDB bisa berjalan semestinya.

"Saran perbaikan meliputi aspek teknis, dan aspek kebijakan non teknis. Termasuk mengambil langkah-langkah penindakan hukum dan administratif terhadap pihak-pihak yang melakukan atau terlibat dalam kecurangan selama PPDB," katanya.

### Sesuai aturan

Kepala Disdukcapil Kota Yogyakarta, Septi Sri Rejeki, mengatakan bahwa pihaknya melayani proses perpindahan penduduk ini selaras dengan ketentuan. Hal tersebut, kata dia, disampaikan secara gamblang pada ORI karena memang tak ada proses-proses yang menyimpang.

"Kalau dari sisi adminduk memang boleh-boleh saja, mau tiga hari pindah, tujuh hari pindah, tidak masalah, selama dia memiliki surat keterangan warga negara Indonesia dari daerah asalnya, kan," ujar Septi.

Ia pun menjelaskan, temuan KK dengan status famili lain yang dijumpai dalam proses PPDB zonasi wilayah itu

### ADUAN MASYARAKAT

- ORI DIY telusuri fenomena numpang KK dalam PPDB jalur Zonasi.
- Ada satu rumah di dekat sekolah favorit yang tercatat memiliki 20 anak dengan status famili lain.
- ORI DIY meminta data adminduk dari Disdukcapil Kota Yogya.
- Disdukcapil Kota Yogya menyatakan pelayanan sesuai prosedur yang berlaku.

seluruhnya sudah selaras dengan aturan. Alhasil, ia memastikan, pihaknya sama sekali tidak melanggar ketentuan yang tertera dalam perundang-undangan, atau UU Adminduk, dalam mengulirkan layanan.

"Statusnya saudara jauh, terus dalam KK dimasukkan sebagai famili lain, jadi ada wadahnya. Dari adminduk, kami on the track, tidak menyimpang. Terlebih, ketika persyaratannya lengkap, kami tidak bisa melakukan penolakan, harus dilayani, kalau kami menolak, kami bisa kena PTUN, kan," imbuh Septi.

Hanya saja, ia memastikan, Pemkot Yogya pun siap sedia menerima masukan-masukan dari semua pihak, untuk perbaikan pelaksanaan PPDB ke depan. Salah satunya, terkait pengetahuan regulasi yang tak sebatas menyebarkan berdomisili di daerah sekolah minimal 1 tahun sebelum PPDB yang dibuktikan melalui KK.

"Misalnya, dalam PPDB harus ada surat pernyataan, bahwa yang bersangkutan benar-benar tinggal di alamat tersebut. Kalau tidak, harus siap dicoret, dikeluarkan dari proses PPDB," tandasnya. (aka)

| Instansi                          | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|-----------------------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Kependudukan dan Catatan | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 18 Juli 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005